

Antara Marhaenisme dan Marxisme

Abira Massi Armond

Penulis : Sayuti Melik
Penerbit : Kendi Publisher
Tahun : 2018
Halaman : 103

Marhaenisme adalah suatu paham atau ajaran (*-isme*) yang memiliki pengaruh sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Marhaenisme pertama kali dirumuskan oleh Soekarno. Istilah ini ia temukan ketika sedang berjalan-jalan tanpa arah tujuan di Bandung dan menemui seorang petani bernama Marhaen. Petani tersebut sedang memacul di sawahnya sendiri, menggunakan cangkulnya sendiri, tetapi tetap hidup dalam kemiskinan (Feith & Castels, 1988). Sejak bertemu dengannya, Soekarno kerap menggunakan istilah Marhaenisme sebagai simbol perjuangan melalui ajaran-ajarannya. Marhaenisme sebagai ideologi memiliki tafsir yang beragam semenjak awal kemunculannya. Keberagaman ini disebabkan tidak adanya penjelasan resmi yang cukup lengkap, baik dari partai-partai pada masa itu yang menggunakan Marhaenisme sebagai asas, maupun dari Soekarno sendiri.

Beberapa tokoh yang menganggap dirinya seorang Marhaenis memiliki pendapat yang berbeda-beda. Misalnya, Partai Indonesia (Partindo) melalui Asmara Hadi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) melalui Suwirjo memiliki asas Marhaenisme yang berbeda makna. Kaum Partindo mengatakan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang disesuaikan dan dilaksanakan (*toegepast*) dengan situasi Indonesia. Di sisi lain, pandangan Partindo ditolak karena kaum PNI menolak Marxisme. Mereka menganggap Marhaenisme PNI adalah Marhaenisme Soekarno, bukan yang berasal dari

Marxisme. Meskipun kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan makna secara filosofis, mereka tetap memiliki persamaan yang satu, yakni Marhaenisme adalah pemikiran Soekarno. PNI memang menolak Marxisme sebagai filsafat, tetapi mereka tetap menerima pandangan Marxisme sebagai metode ilmiah untuk menganalisis keadaan masyarakat. Melalui perdebatan kedua tokoh ini, Sayuti Melik menulis buku *Antara Marhaenisme dan Marxisme* untuk membandingkan perbedaan mendasar antara kedua ideologi ini, sekaligus menjelaskan makna Marhaenisme menurut pendapatnya sendiri.

Menurut Sayuti, Marhaenisme bukan hanya Marxisme yang dilaksanakan di Indonesia. Faktanya, Marxisme *toegepast* sudah termanifestasi di Indonesia sebelum Marhaenisme hadir, yakni paham yang melahirkan Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh, dan Angkatan Komunis Muda (Acoma). Ia menambahkan, memang banyak persamaan antara Marhaenisme dan Marxisme. Akan tetapi, kedua pemikiran ini memiliki perbedaan prinsipil. Fakta ini cukup membingungkan orang banyak. Apabila Marhaenisme adalah Marxisme yang dilaksanakan di Indonesia, artinya, Soekarno adalah seorang penganut materialisme. Padahal, menurut Sayuti, Soekarno adalah seorang nasionalisme revolusioner yang tidak menganut asas-asas tersebut.

Makna Marhaenisme dan Marxisme

Untuk memahami perbedaan kedua pemikiran tersebut, Sayuti menekankan bahwa kita harus memahami makna dari Marhaenisme itu sendiri. Upaya memahami ini dapat dijawab menjadi tiga bagian: arti kata, pengertian, dan perbandingannya dengan *-isme* lainnya. Menjawab melalui arti kata, Marhaenisme adalah *-isme* dari kaum Marhaen. Marhaen dapat diartikan sebagai kaum proletar atau buruh Indonesia, kaum petani yang kesulitan, dan kaum melarat Indonesia lainnya. Dengan kata lain, bukan hanya buruh dan tani, melainkan semua yang melarat: pedagang kecil, kaum *ngarit*,

tukang kaleng, nelayan, dan lainnya (Soekarno, 2019). -isme tersebut digunakan sebagai simbol untuk memerangi kemiskinan dan merebut kekuasaan. Sedangkan menurut pengertiannya, Marhaenisme adalah ilmu perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan, serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Apabila menjawab pertanyaan ketiga mengenai perbandingan, Marhaenisme adalah semacam sosialisme ilmiah yang hendak mewujudkan masyarakat sosialis sesuai dengan keadaan dan kepribadian suatu bangsa.

Isi dari ajaran-ajaran Marhaenisme itu sendiri ada dua: sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Pertama, “api” dari sosionasionalisme adalah nasionalisme itu sendiri. Jika bukan seorang nasionalis, maka tidak bisa dikatakan seorang Marhaenis. Sosionasionalisme yang dimaksud adalah kesadaran bernegara yang menganjurkan persatuan nasional. Tidak ada pertentangan kelas, tidak ada pertentangan partai, dan tidak ada pertentangan golongan. Semua hanya satu, yakni kedamaian nasional dan persatuan nasional. Soekarno tidak pernah menggunakan semboyan Marxis untuk mendasari perjuangannya seperti: “Kaum Nasionalis seluruh dunia, bersatulah!”, melainkan yang selalu diserukan adalah: “Rakyat seluruh Indonesia, bersatulah!”. Filsafat sosionasionalisme adalah mengenai humanisme, kebangsaan, dan perikemanusiaan. Nasionalismenya rakyat Indonesia bukanlah nasionalisme dengan makna terbatas seperti sauvanisme (*Chauvinism*), melainkan nasionalisme yang juga menjunjung tinggi rasa persaudaraan antarbangsa dan kemanusiaan. Menurut Soekarno dalam buku Sayuti Melik, untuk melahirkan dan memelihara nasionalisme, penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Selain itu, untuk memelihara hubungan internasional yang sehat, maka kolonialisme harus terlebih dulu dilenyapkan di seluruh negeri. Kedua, sosiodemokrasi yang bermakna demokrasi rakyat. Konsep demokrasi yang dimaksud adalah berusaha untuk menyatukan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Artinya, demokrasi

tidak hanya terpatri kepada keadilan dan kesetaraan politik, melainkan terhadap kebutuhan rakyat dalam hal ekonomi. Otoritas politik dan ekonomi dikembalikan ke rakyat. Hemat kata, dari rakyat untuk rakyat. Sosiodemokrasi merupakan manifestasi Marhaenisme untuk mewujudkan masyarakat adil makmur tanpa kapitalisme dan imperialisme.

Setelah memahami makna Marhaenisme, perlu juga untuk memahami makna dari Marxisme. Menurut Sayuti Melik, apabila menjawab dari arti katanya, Marxisme berarti *-isme* yang dikemukakan oleh Marx, sebuah ilmu perjuangan untuk merombak dunia yang sudah ada dan menciptakan dunia yang baru. Jika menjawab dari pengertian maknanya, maka Marxisme adalah ilmu perjuangan kelas proletar untuk menumbangkan kelas borjuis dan kapitalisme, yang ujungnya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ilmu ini disebut juga sebagai sosialis, yang selanjutnya menjadi komunis. Sedangkan menurut perbandingan dengan *-isme* lainnya, Marxisme adalah satu jenis sosialisme ilmiah yang hendak mewujudkan masyarakat sosialis atas dasar kekuatan perjuangan internasional. Marxisme membagi dunia hanya menjadi dua kelas saja: kelas yang menindas dan kelas yang ditindas. Kelas tersebut diwujudkan dalam bentuk borjuis (yang menindas) dan proletar atau buruh (yang ditindas). Tujuan perjuangan Marxisme adalah mewujudkan masyarakat sosialis di seluruh dunia, yakni melalui revolusi sosialis. Berbeda dengan Marhaenisme, “api” dari Marxisme adalah berlakunya tiga hal yang terus dinyalakan sebagai alat perjuangan: dialektika di dalam masyarakat, hancurnya masyarakat borjuis, dan gerakan massa-aksi.

Pertama, dialektika di dalam masyarakat yang secara singkatnya bisa dijelaskan dalam beberapa hal: tidak ada suatu gejala dalam masyarakat yang dapat dimengerti dengan tepat, apabila dilepaskan dari hubungannya dengan gejala lainnya; tidak ada sesuatu yang diam dalam masyarakat. Artinya, semua masyarakat berubah-ubah dan selalu bergerak; perubahan di

dalam masyarakat terjadi dalam dua jalan, yakni revolusi dan evolusi yang selalu berganti; dan di setiap masyarakat selalu muncul pertentangan-pertentangan yang membuat masyarakat bergerak maju. Proses tersebut akan tumbuh dan menciptakan unsur baru yang dianggap sintesis, yakni hasil pertentangan antara tesis dan antitesis. *Kedua*, kapitalisme pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Kehancuran kapitalisme adalah keharusan untuk perkembangan masyarakat yang lebih maju. Selaras dengan maksud konsep pertama, kapitalisme (tesis) pasti memiliki pertentangan (antitesis), sehingga kapitalisme mati dan kemudian memunculkan sosialisme yang berkembang di muka bumi ini (sintesis). *Ketiga*, gerakan massa-aksi. Untuk mencapai tujuan Marxisme seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperlukan adanya gerakan atau kekuatan massa. Gerakan massa ini adalah manifestasi dari teori revolusioner.

Persamaan dan Perbedaan Marhaenisme dan Marxisme

Sayuti Melik menjelaskan bahwa pangkal persamaan antara Marhaenisme dan Marxisme ada dua: sama-sama merupakan paham sosialisme dan sama-sama bersifat ilmiah yang dapat digunakan menjadi pisau analisis. Pertama, sosialisme merupakan paham yang menekankan kehidupan kolektif berdasarkan persamaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama, serta menolak individualisme dan kapitalisme yang mengutamakan kepentingan pribadi dan cenderung menimbulkan penindasan. Dalam sosialisme, alat produksi harus dimiliki bersama untuk menghindari “pengisapan” oleh individu atau kelompok tertentu. Paham ini mendukung gotong-royong, persaudaraan, serta keadilan sosial tanpa diskriminasi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Sosialisme juga mengajarkan penerapan sistem ekonomi yang terencana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Prinsip-prinsip ini memiliki kesamaan dengan ajaran Marhaenisme dan Marxisme, meskipun terdapat perbedaan dalam detail

penerapannya. Kedua, Marhaenisme dan Marxisme sama-sama merupakan bentuk sosialisme ilmiah yang dirumuskan berdasarkan penyelidikan dan analisis perkembangan masyarakat. Keduanya memiliki tujuan mewujudkan masyarakat sosialis melalui perombakan struktur masyarakat yang ada, menggunakan pendekatan revolusioner dan analisis dialektika. Baik Marhaenisme maupun Marxisme bersifat revolusioner, dengan orientasi haluan kiri yang menekankan perubahan fundamental demi terciptanya masyarakat yang adil dan setara.

Sayuti Melik menambahkan perbedaan antara kedua *-isme* tersebut yang sama-sama memiliki dua pangkal: *Sangkan Paraning Dumadi*-nya dan filsafatnya. Pertama, *Sangkan Paraning Dumadi* atau dasar perjuangan dan pandangan hidup yang mereka anut. Marxisme didasarkan dari analisis kehidupan massa proletariat di Eropa Barat pada pertengahan abad ke-19, yang fokusnya kepada perjuangan kelas untuk menghancurkan kapitalisme dan menciptakan masyarakat sosialis serta komunis. Sebaliknya, Marhaenisme berakar kepada kenyataan hidup kaum Marhaen, terutama petani kecil dan tak bertanah di Indonesia pada pertengahan abad ke-20, yang fokusnya untuk membangkitkan kepribadian dan persatuan bangsa. Perbedaan dasar ini juga menghasilkan perbedaan dalam praktik perjuangan yang dilakukan: Marxisme menekankan solidaritas internasional proletariat dan materialisme, sedangkan Marhaenisme mengedepankan nasionalisme, pandangan hidup yang lebih organis dan religius, serta tidak terlalu bergantung kepada konflik kelas. Kedua, filsafat Marxisme berlandaskan materialisme historis, yang menekankan determinisme ekonomi sebagai faktor utama dalam perkembangan masyarakat. Sementara itu, Marhaenisme menggunakan filsafat vitalisme historis, yang melihat kebudayaan secara luas—termasuk ekonomi, kenegaraan, keagamaan, dan lain-lain—sebagai elemen yang saling memengaruhi dalam perubahan masyarakat. Marhaenisme tidak sepenuhnya menerima determinisme ekonomi Marxisme

dan tidak selalu menekankan peran kebudayaan sebagai faktor satu-satunya. Perbedaan filsafat ini juga berdampak kepada praktik perjuangan: Marxisme melahirkan “negara golongan” yang ujungnya menjadi diktator proletariat, sedangkan Marhaenisme melahirkan negara sebagai alat perjuangan bangsa “demokrasi dengan pimpinan” atau demokrasi terpimpin.

Manifestasi Marhaenisme dan Penerapannya di Masa Kini

Lahirnya Marhaenisme sebagai simbol perjuangan muncul karena antipati Soekarno terhadap asing, baik karena kapitalisme (sistem ekonomi) maupun kolonialisme-imperialisme (penjajahan). Sebagai ideologi politik, pola perjuangannya pun bersifat nonkooperatif seperti tidak mau bekerja sama dengan pihak asing dan penjajah. Apabila dimanifestasikan dalam bentuk pemerintahan, Marhaenisme melahirkan kepemimpinan seperti pada masa Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno (Wibowo, 2005). Marhaenisme mengambil konsep negara dari pemikiran Hegel, yang menganggap kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara dianggap sudah mewakili (dan menjamin) kepentingan masyarakat. Artinya, asas Marhaenisme memiliki makna bahwa setiap warga wajib berbakti kepada negara, serta setiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Melalui asas Pancasila, ajaran Marhaenisme sempat ditawarkan Soekarno saat pidato di sidang BPUPKI 1 Juni 1945, yaitu: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme (Peri Kemanusiaan); 3. Mufakat (Demokrasi); 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa (Soekarno, 2019). Namun, bagaimana bentuk penerapan Marhaenisme pada masa kontemporer?

Pada masa kini, Marhaenisme mengalami adaptasi seiring kondisi sosial dan ekonomi yang terus mengalami perubahan. Meskipun penjajahan secara fisik sudah tidak lagi dialami oleh Indonesia, eksistensi penjajahan hadir dalam bentuk yang berbeda. Eksploitasi sumber daya alam, investasi asing yang tidak

beretika, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan pendidikan, dan masalah kesehatan menjadi permasalahan yang dihadapi kaum Marhaen kontemporer. Pekerja buruh, nelayan, petani, dan rakyat kecil harus bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis yang semakin kompetitif. Buruh yang harus terjebak dengan sistem kerja kontrak tanpa jaminan kesejahteraan, nelayan yang harus melawan industri perikanan berskala besar, hingga petani yang harus kehilangan tanah mereka akibat konflik agraria dengan korporasi besar membuat permasalahan kaum Marhaen mengalami pergeseran jika dibandingkan dengan kaum Marhaen masa kolonial.

Oleh karena itu, Marhaenisme sebagai asas perjuangan masih relevan meskipun zaman mengalami perubahan. Nilai-nilai keadilan sosial, antikolonialisme, antiimperialisme, hingga kemandirian ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar perjuangan untuk berjuang melawan kapitalisme modern. Nilai Marhaenisme akan terus hidup melalui gerakan-gerakan akar rumput dan advokasi kebijakan yang memperjuangkan hak kaum Marhaen. Inisiatif reformasi agraria oleh negara, hadirnya serikat buruh, serta organisasi kolektif yang sedang berjuang umumnya kerap menggunakan prinsip dan nilai-nilai Marhaenisme untuk menuntut distribusi sumber daya yang adil. Gerakan tersebut merefleksikan visi sosiodemokrasi Soekarno, sekaligus memastikan suara kaum Marhaen tidak terpinggirkan dan ditindas oleh kekuatan besar. Dengan kata lain, Marhaenisme berevolusi tanpa kehilangan esensi perjuangannya. Marhaenisme tetap menjadi simbol perlawanan terhadap segala bentuk penindasan—baik kolonialisme masa lalu maupun kapitalisme modern—sekaligus penegasan bahwa perjuangan menuju keadilan sosial adalah proses yang terus berlanjut, sesuai dengan semangat "Berdikari" (berdiri di atas kaki sendiri) yang pernah digaungkan oleh Soekarno.

Referensi

- Feith, H. & Castels, L. (1988). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Depok: LP3S.
- Melik, S. (2018). *Antara Marhaenisme & Marxisme*. Temanggung: Kendi.
- Soekarno. (2019). *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*. Jakarta: Media Pressindo.
- Soekarno. (2019). *Pokok-pokok Ajaran Marhaenisme Menurut Bung Karno*. Jakarta: Media Pressindo.
- Wibowo, Y. S. (2005). *Marhaenisme Ideologi Perjuangan Soekarno*. Yogyakarta: Buana Pustaka.